

Tim Editor:

GM Nur Lintang Muhammad Evi Mariani Syaharbanu Muhammad Azka Fahriza Taufik Murtadho

Foto:

Yusni Aziz

Desain:

Zulfikar Arief

Menulis Untuk Mengingat:

Catatan Penghuni Rusunawa Jatinegara



Perlawanan warga saat penggusuran Bukit Duri, September 2016. Foto oleh: Ciliwung Merdeka.

Globalisasi yang berujung di rumah susun

GM Nur Lintang Muhammad & Rizki Amalia Affiat

Saya lahir di Kampung Pulo. Saya sering bermain bersama teman-teman di kali. Hatiku menjadi senang, [...] tetapi kalau pada musim hujan kampungku menjadi banjir. Setelah banjir kampung kami penuh sampah. Maka warga Kampung Pulo membersihkan desa secara gotong royong. Kata ayah saya, di Kampung Pulo ada program pemerintah namanya normalisasi kali. Warga akan digusur. Akibatnya, ada perlawanan dari warga. Warga sangat berberat hati menempati rusunawa karena harus membayar sewa untuk seumur hidup. Banyak warga tidak mampu membayarnya.

~ Farah, 11 tahun

utipan di atas adalah bagian dari kisah yang ditulis oleh salah seorang anak penghuni rusunawa yang ikut serta dalam kelas menulis Islam Bergerak beberapa waktu silam. Pelatihan tersebut memberi ruang bagi sebagian warga untuk bebas menuangkan perasaan dan pengalaman mereka menghuni tempat baru pasca penggusuran.

Apa yang ditulis oleh Farah tak hanya cerminan dari bagaimana anak-anak ini tumbuh bersama lingkungannya dan menghadapi langsung wajah keras ibukota. Lebih jauh lagi, ia menunjukkan pada kita apa yang telah direnggut oleh 'kemajuan': semangat komunal. Ada kebersamaan, gotong royong, dan permainan di alam terbuka yang tak bisa digantikan oleh wisata berbayar dan gawai. Makna rumah bagi warga yang hidup berdampingan dan berinteraksi sebagai satu komunitas tergantikan oleh rumah sewa bertumpuk ke atas. Tapi, ini bukan soal romantisme belaka.

Jakarta memang sedang berbenah. Beberapa 'kemajuan' sudah dicapai. Pertama, sebagai ibukota dari negara yang memiliki <u>akselerasi tercepat dalam jurang antara si kaya si miskin di antara negarangara berkembang</u>. Kedua, sebagai kota yang <u>paling banyak berdiri pusat perbelanjaan atau mall.</u> Ketiga, tampaknya ini adalah capaian terbaru dari kepemimpinan Gubernur Ahok: <u>penggusuran rutin</u>

sebagai upaya menata kota agar semakin modern, canggih, bersih dan apik. Tak tanggung-tanggung, penggusuran ini juga diimingi oleh janji-janji - atau tepatnya seperti sebuah judul dokumenter: harapan palsu – terhadap kaum tergusur yang konon memang golongan yang tak enak dipandang, setidaknya dalam menjual turisme dan mimpi-mimpi urban metropolitan.

Tapi, apakah yang dibayangkan, dimaknai, dan dikonstruksikan kepada kita di dalam kata 'kemajuan' itu?

Contoh lainnya adalah Uming (59). Ia tengah menghadiri rapat persiapan agustusan saat mendengar kabar penggusuran itu. Ia mulai cemas. Untuk apa merayakan kemerdekaan dengan menghias kampung dan menggelar lomba-lomba kalau toh rumahnya akan tergilas, begitu pikirnya. Bulan Agustus 2015 itu, Uming bersama ratusan keluarga lainnya di Kampung Pulo, Jakarta, harus kehilangan rumah yang mereka tempati dan bangun perlahanlahan selama puluhan tahun. Mereka harus mengalah pada agenda kota yang ingin melihat Kali Ciliwung bersih dari manusia.

Ini bukan pertama kalinya Uming melewati bulan kemerdekaan dengan kekecewaan. Tepat setahun sebelumnya, warung kopi di pinggir Jalan Jatinegara Barat yang selama 10 tahun terakhir menjadi tulang punggung keluarga juga digusur entah kenapa.

"Saya sudah tidak punya nasionalisme," kata Uming.

Pada awal 1990an, dia sempat sukses sebagai perakit barang-barang elektronik dengan karyawan delapan orang dan distribusi barang sampai Singapura dan Batam. Namun, usaha itu layu sebelum berkembang. Uming tidak tahu kalau usahanya kalah saat pemerintah memutuskan bergabung dengan WTO. Tahun 1995 itu, Indonesia harus menghapus tarif impor barang-barang elektronik yang selama ini dia jual. Dia juga tidak tahu kalau pesaing-pesaingnya dari China mendapatkan subsidi dari pemerintah setempat sehingga bisa memasang harga murah.

Yang dia tahu, pasar Glodok tiba-tiba kebanjiran barang murah dari Cina. Produk Uming kalah harga sehingga terpaksa tutup usaha. Kantornya di Jatinegara kini ditempati oleh *Indomaret*, sebuah toko waralaba milik salah satu konglomerat paling kaya di Indonesia, Salim Group.

Setelah 10 tahun susah payah memulai usaha warung kopi dengan keuntungan bersih Rp100.000 per hari, Uming harus kembali berhadapan dengan instrumen globalisasi lain yang belum dia kenal betul, Bank Dunia--sebuah institusi keuangan internasional yang dibentuk usai Perang Dunia II untuk memberi pinjaman pembangunan negara-negara dunia ketiga.

Program normalisasi Sungai Ciliwung yang menggusur rumahnya tahun 2015 merupakan bagian dari *Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JEDI) yang didanai dari pinjaman Bank Dunia senilai lebih dari satu trilyun rupiah. Uming tidak pernah mendengar JEDI. Ia hanya tahu pentungan aparat lokal dan wajah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Uming hanya satu dari puluhan ribu warga Indonesia lain yang tergusur oleh agenda pembangunan yang dimodali Bank Dunia. Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif (ICIJ) mencatat, hanya dalam satu dekade, <u>sudah lebih dari 3.300.000 orang di seluruh dunia kehilangan rumah, tanah, dan mata pencaharian</u> akibat proyek-proyek Bank Dunia.

Jutaan korban penggusuran di Brasil, Uganda, India, sampai Indonesia harus menghadapi nasib yang sama dengan Uming. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah sindikasi internasional yang tidak berwajah. Para korban itu hanya bisa pasrah menghadapi serdadu lokal bersenapan. Ciri umum penggusuran di negara-negara itu sama saja, semakin jauhnya pengambil keputusan dengan warga yang terdampak langsung atas kebijakan. Akibatnya, banyak konsekuensi-konsekuensi buruk yang tidak terduga.

Dalam kasus Uming misalnya, dia mencoba bekerja serabutan di usia senja dengan memperbaiki rumah tetangga selama setahun usai warung kopi miliknya digusur Satuan Polisi Pamong Praja. Namun setelah pindah ke rumah susun sewa di Jatinegara Barat, dia tidak tahu lagi harus melakukan apa mengingat semua perbaikan dilakukan oleh pengelola.

ICIJ menyimpulkan bahwa pengawasan serampangan terhadap proyek yang didanai dari hutang Bank Dunia telah "merugikan warga pemukiman kumuh kota, serta memiskinkan petani, nelayan, dan masyarakat adat."

Meski Bank Dunia mengaku sudah berbenah, kecenderungan antipati terhadap partisipasi warga dalam pembangunan di Indonesia sepertinya masih terus akan berlanjut di bawah Presiden Joko Widodo yang tengah mengumpulkan hutang dari institusi perbankan internasional untuk membiayai mega proyek infrastrukturnya. Lihat saja apa yang terjadi di Majalengka beberapa hari terakhir. Enam petani ditangkap karena mempertahankan tanah sendiri dari pembangunan bandar udara internasional Kertajati, Jawa Barat.

Pelatihan menulis

Putusnya rantai komunikasi antara warga dengan pengambil kebijakan dan institusi internasional membuat kami, *Islam Bergerak* bersama Yusni Aziz dari *Ruang Arsitektur* dan jurnalis senior *The Jakarta Post*, Evi Mariani, memutuskan untuk menggelar pelatihan menulis bagi sebagian warga yang menjadi korban di rumah susun sewa Jatinegara Barat selama beberapa bulan terakhir.

Pendanaannya bersifat swadaya yang bersumber dari kocek teman-teman sendiri. Berbekal semangat dan komitmen tinggi dari teman-teman, serta kesediaan dan keramahan warga rusun dalam kegiatan sukarela inilah pelatihan ini dapat terwujud dengan segala suka dukanya. Belakangan, ketika The Guardian menghubungi kami dan tertarik untuk mempublikasikan sebagian karya tulis warga dalam segmen khususnya, semua honor kami serahkan pada penulis dan forum warga.

Tentu saja kami sadar bahwa ketimpangan informasi bukan satu-satunya penyebab absennya partisipasi warga, melainkan juga ketimpangan struktur kuasa yang membuat pengambil kebijakan bisa dengan mudah mengabaikan aspirasi dari bawah. Problem ini hanya bisa diatasi dengan organisasi massa yang mampu membangun gerakan kolektif dengan basis teoritis yang kuat dan keberpihakan yang jelas pada kaum tertindas.

Kami memilih eks-warga Kampung Pulo, selain karena alasan lokasi yang berada di pusat kota, juga merupakan korban yang paling banyak mendapat stigma negatif dari kelas menengah--salah satu penyebab timpangnya struktur kuasa di Jakarta karena praktis tidak ada lagi suara yang membantu aspirasi masyarakat bawah. Kami mengakui bahwa secara teknis, hasil dari pelatihan ini masih sangat sederhana. Tapi setidaknya, tulisan dari 12 warga eks-Kampung Pulo bisa membuktikan bahwa globalisasi yang impersonal adalah persoalan yang sangat personal bagi mereka yang mengalaminya.

Ada cerita tentang kucing peliharaan milik Ayu, seorang anak kelas 5 sekolah dasar, yang mati terlindas ekskavator. Ada Eppi yang harus memutus sekolah anak sendiri karena tidak bisa lagi mengawasi dari rumah susun. Ada pula Ida, ibu rumah tangga yang membawa gerobak soto naik turun tangga untuk mendapatkan tempat jualan yang lebih strategis.

Kota, kapital, dan keadilan yang terserak

Kini Bukit Duri di bantaran Ciliwung tinggal puingpuing. Perlawanan berkepanjangan telah dilakukan. Ragam pemikiran dan kontroversi – dari mulai dukungan militan hingga cemoohan – disematkan oleh berbagai kalangan pada perjuangan melawan mesin pembangunan. Logika 'memindahkan segelintir warga demi keselamatan jutaan warga' menjadi narasi dominan penggusuran di berbagai sudut ibu kota. Logika ini mengganti wajah-wajah personal tiap penghuni kota menjadi statistik yang harus berkorban atas nama kepentingan umum yang lebih luas.

Tentu saja, soal 'kepentingan umum yang lebih luas' harus kita perdebatkan lagi aspek keadilannya di tengah semakin tebalnya sekat-sekat kelas di masyarakat dalam rengkuhan segala yang berbau uang: sewa, pajak, keuntungan. Tentu lebih mudah menggusur rakyat jelata ketimbang harus berhadapan dengan kemapanan bangunan bertingkat berbiaya mahal atas nama izin, legalitas, dan aturan

hukum. Seolah tiada alternatif beperspektif ramah manusia dan ramah lingkungan yang bisa diadopsi untuk memberi ruang bernafas yang setara bagi setiap warga.

Kemajuan ini juga membangun ilusi pemandangan indah yang hendak dipamerkan pada seluruh penduduk kota. Maka, relokasi sebenarnya adalah lokalisasi, tempat kaum kelas menengah bawah atau yang menghuni lahan-lahan bantaran rel kereta api dan sungai untuk dicaplok penguasa/pengusaha dikumpulkan dan diperas ke dalam sebuah kompleks vertikal berbeton, diiringi oleh fasilitas-fasilitas tertentu. Inilah modern dan keteraturan. Inilah kesamaan bagi hak warga negara: bantaran sungai dan rel kereta api itu akan ditata apik, kanan kirinya berdiri apartemen dan pusat perbelanjaan.

Jelas pembangunan rusun yang apik bisa tampak sekilas menyamai kerapihan bangunan apartemen mahal yang mulai membuncah dari karut marut kota. Namun, 'kesamaan' yang hanya berupa selubung pembangunan fisik ini dipukul rata menjadi sebuah rangka kota yang kosong makna dan tak ada isi. Bank Dunia dan institusi finansial sebenarnya punya instrumen untuk memastikan agar dana hutang digunakan untuk pembangunan yang manusiawi, bukan menutup mata terhadap kekerasan dalam penggusuran. Sementara pemerintah punya mekanisme politik untuk mendengar suara rakyat, bukan malah menuduh mereka sebagai "makelar tanah" yang "tidak tahu diri." Adalah tugas negara dan komunitas internasional untuk mengartikulasikan suara-suara personal itu ke dalam kebijakan umum yang memberi untung bagi semua orang.

Semangat membangun kota dengan prinsip persaudaraan dan egaliter adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Medinah setelah beliau dan rombongan Muslim pertama hijrah dari Mekah. Terkenal dengan 'Piagam Madinah', perjanjian ini tak hanya mencerminkan contoh sejarah Islam yang menekankan semata pada perdamaian dan 'pluralisme', tapi juga sebuah strategi perlawanan (konsolidasi dan penaklukkan kembali Mekah) terhadap penindasan yang dialami oleh kaum Muslim. Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang pemimpin agama dan pemimpin politik, juga menata kota dalam artian sesungguhnya: setelah membangun fondasi moral dan spiritual kolektif, beliau mencanangkan aturan dan konsensus bersama, lalu mempraktekkan solidaritas sosial melalui pengelolaan tanah dan kepemilikan.

Prinsip egalitarian yang diperkenalkan Nabi
Muhammad SAW di Madinah ini lebih jauh lagi juga
merangsek masuk ke kultur patriarkis Arab pada
waktu itu, yaitu dengan memperkenalkan istri-istri
Nabi di ruang publik dan dalam diskursus publik. Pada
waktu itu kaum Muslim di Madinah berada dalam
situasi bertahan secara militer dan butuh kekuatan
untuk melawan kaum berbasis suku yang konservatif.
Solidaritas sosial merupakan fondasi penting yang
melampaui tujuan penaklukkan Mekah. Dengannya, ia
membangun peradaban.

Dalam konteks penggusuran di Jakarta, seberapapun sulitnya, suara warga yang terpinggirkan harus dicatat. Semuanya harus mendapat tempat. Jika tidak, <u>lan Wilson sudah memberi peringatan</u> bahwa aksi pada 4 November lalu adalah ekspresi ketidakadilan sosial di Jakarta. Sudah wajib hukumnya untuk mendengar suara kaum marjinal. Mereka yang tergusur. Karena keputus-asaan menyimpan kekuatan berbahaya di jalanan dan bilik suara. Mereka lah suara keadilan yang terserak dan mampu terhimpun kembali.

Jakarta, 10 Desember 2016



Foto oleh: Ciliwung Merdeka.



Referensi:

 $Indonesia's jarring\ wealth\ gap-Al\ Jazeera\ English\ http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/indonesia-jarring-wealth-gap-2014728101920261316.html$

Jakarta, Kota dengan Mal Terbanyak di Dunia http://metro.news.viva.co.id/news/read/165684-jumlah-mal-di-jakarta-sudah-tak-ideal

LBH: Ada 113 Penggusuran Paksa di Bawah Ahok pada 2015 | Republika Online http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/05/24/070l35377-lbh-ada-113-penggusuran-paksa-di-bawah-ahok-pada-2015

U.S. says China to end export subsidies in seven sectors - Business Insider http://www.businessinsider.com/r-us-says-china-to-end-export-subsidies-in-seven-sectors-2016-4?IR=T&r=US&IR=T

How The World Bank Broke Its Promise to Protect the Poor http://projects.huffingtonpost.com/projects/worldbank-evicted-abandoned

Tolak Bandara Internasional, 6 Petani Majalengka Ditahan http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161117203340-20-173412/tolak-bandara-internasional-6-petani-majalengka-ditahan/

My house was turned to debris': Jakarta's evicted write their story | Cities | The Guardian https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/23/house-turned-debris-voices-evicted-kampung-pulo-jakarta

Making enemies out of friends - New Mandala http://www.newmandala.org/making-enemies-friends/





Program normalisasi Kali Ciliwung, tempat di mana aku kebetulan tinggal, sudah menjadi bagian dari objek rencana pemerintah daerah. Sejatinya relokasi menjadi keniscayaan. Tapi bukan suatu yang harus dilakukan dengan terburu-buru.

Dalam benak semua orang, yang terlintas dari program itu adalah ganti rugi yang memadai dan memberikan manfaat. Sebuah kompensasi yang wajar.

Hal demikian sesuai dengan pernyataan Gubernur Joko Widodo ketika beliau masih menjabat. Bahwa seluruh barang yang ada nilainya akan diganti dengan uang. Dengan janji itu, tidak ada satupun warga yang khawatir akan tergusur saat para pengukur tanah hadir untuk melakukan pengukuran bangunan. Semua meyakini akan ada ganti rugi, bahwa kompensasi itu benar terwujud.

Warga pun antusias membantu para petugas.
Demikian amat langka bila kita lihat di beberapa tempat sebelumnya. Para petugas saat itu agak terkejut penuh kesenangan melihat masyarakat begitu ramah dan peduli.

Itulah barangkali gambaran saat itu. Masyarakat mulai menghitung kalkulasi sesuai informasi yang mereka ketahui. Demikian pula aku.

Selanjutnya berselang waktu, kegiatan pertemuan dan rapat antara petugas dengan warga semakin intens. Panitia Sembilan telah terbentuk oleh warga dengan susunan pengurusnya.

Singkat kata, semakin mendekati waktu keputusan pemerintah, hasilnya nihil. Anda bisa membayangkan manakala pemerintah provinsi mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar apapun kepada warga kecuali yang memiliki sertifikat.

Semua orang marah, kecewa, mempertanyakan apa artinya pengukuran tanah dan klasifikasi bangunan bila akhirnya pemerintah provinsi ingkar dengan dalih sertifikat.

Ini suatu akal-akalan. Mereka dengan seenaknya mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Kalau itu persyaratannya, sirna harapan warga untuk mendapatkan ganti rugi. Alih-alih bangunannya saja, ternyata uang kerohiman ataupun santunan pun tak diberikan. Maka tak lain warga harus direlokasi ke rumah susun Jatinegara Barat.

Peristiwa hari Kamis, 20 Agustus 2015 masih teringat jelas. Sebuah kenangan yang tak-terlupakan dalam hidup ini, juga bagi warga yang lainnya.

Tak dapat terlukiskan saat itu, ketika terdengar adanya kerumunan warga beserta aparat penegak hukum, Satpol PP, dan militer barhadap-hadapan untuk saling menyerang.

Nampak para pemuda yang sebagian besar mewakili warga sangat bersemangat untuk membela tempat tinggalnya agar tidak dieksekusi.

Tempat yang didiami berpuluh-puluh tahun seakan tak sudi lepas begitu saja tanpa adanya kompensasi. Normalisasi pada prinsipnya kami setuju dan siap. Bagi kami, yang terpenting adalah keadilan. Tapi ternyata keadilan belum berpihak kepada orang kecil.

Manusia untuk pembangunan dan bukan pembangunan untuk manusia. Demokrasi yang mengabaikan hak asasi manusia. Hak hidup orang banyak terabaikan begitu saja. Huh, masih banyak persoalan-persoalan yang tidak kumengerti.

Peristiwa 20 Agustus itu terjadi juga. Mereka saling menyerang, saling menghantam antara warga dengan petugas.

Suasana begitu mencekam. Perang kelompok terus berlanjut manakala petugas menembakkan gas air mata. Sejurus kemudian para pemuda mundur. Mata mereka tak tahan perih. Begitu pula aparat semakin membabi buta untuk menangkap pemuda yang dianggap sebagai provokator. Bahkan yang tidak bersalah turut menjadi korban.

Keadaan jadi begitu kacau. Akhirnya aku sendiri bergegas pulang untuk menyelamatkan diri. Tak beberapa lama, rumah warga di muka jalan langsung hancur dan terbongkar.

Mesin itu bergerak begitu cepat. Bangunan itu tidak berdaya, lumat dimakan cengkeramannya.

Harta benda mereka tak menyisakan apapun karena mereka belum sempat memindahkannya. Pandangan warga nampak kosong oleh kecongkaan petugas. Wajah pasrah begitu nampak.

Rumahku terkena giliran gusur keesokan harinya. Rumahku dilumat seketika dan aku begitu sedih



sementara istriku tidak tahan dan jatuh pingsan. Rumahku sudah rata hanya meninggalkan puing-puing sehingga tiada pilihan lain selain meninggalkannya walau berat hati.

.....

Rumahku yang telah hancur rata dengan tanah itu banyak menyimpan kenangan selama hidupku, dari kecil hingga masa tua. Puluhan tahun aku menghuni rumah itu walaupun hanya bangunan biasa sebagaimana umumnya rumah di bantaran kali. Namun aku sangat nyaman dan tenteram.

Barangkali, itulah yang menyebabkan tak mudah melupakan.

Dahulu di era 60an dan 70an, banjir tidak seperti sekarang. Kali saat itu masih bersahabat dengan tinggi banjir sedengkul orang.

Sebelum hancur, rumahku telah dirombak dua kali. Keluargaku tergolong tidak mampu, sehingga tentu amat sulit untuk memperbaiki rumah tersebut. Segenap daya dan upaya sudah kuupayakan untuk mewujudkannya menjadi rumah baru.

Alhamdullilah akhirnya rumah itu berdiri dan terbentuk dengan kokoh, meski aku harus hutang sana-sini. Tapi rumah yang sudah berpuluh-puluh tahun aku tinggali, dibangun dengan pinjaman sana-sini, itu kini sirna oleh nafsu pembangunan yang meluluh lantakkan sosial budaya serta kearifan sosial.

Pembangunan bagiku tidak harus menghempaskan kota dari akarnya demi modernisasi. Tapi mau bilang apapun, kami orang kecil tidak berdaya. Kapan keadilan akan berpihak pada kami yang hanya bisa pasrah sebagai warga korban gusuran?

.....

Selanjutnya aku mulai mendiami rusun sewa. Sewa. Inilah babak baru dalam hidupku di tempat yang bukan milikku sendiri. Aku bingung bagaimana melanjutkan hidupku dan memulai kembali di tempat baru. Kebingungan bertambah saat aku terkena penyakit yang harus dioperasi hanya tiga hari setelah mendiami tempat sewa ini.

Aku berharap tempat baru ini bisa berubah menjadi milikku sendiri suatu saat nanti. Semoga Allah mendengar doa-doa kami.



oleh Uming (60 tahun)

Nama saya Uming. Dulu saya usaha warung kopi di jalan Jatinegara. Keuntungan saya sehari bisa mencapai 150.000 rupiah. Uang itu bisa saya gunakan untuk membayar listrik dan air, serta kebutuhan rumah tangga. Saat itu, saya juga masih bisa menabung sehingga bisa membeli rumah. Sedikit-demi sedikit, saya juga bisa mulai memperbaiki rumah.



ada tanggal 28 Agustus 2014, tempat saya berjualan digusur berbarengan dengan pertokoan di jalan yang sama. Saya pun kehilangan mata pencaharian. Demikian pula dengan anak saya yang harus menganggur karena toko tempat dia bekerja juga digusur.

Istri saya mencoba berjualan di rumah sementara saya bekerja serabutan. Terkadang, saya jadi kuli panggul, juga jadi kuli bangunan.

Belum lagi punya usaha tetap, setahun kemudian rumah kami dibantai habis. Hari itu tanggal 20 Agustus 2015.

Padahal saat itu, saya bersama warga setempat sedang mempersiapkan acara perlombaan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan rasa kesal dan sedih, terpaksa kami pindah ke rumah susun hingga kini.

.....

Tanggal 19 Agustus 2015 jam tujuh malam, kami berkumpul di rumah Habib Soleh yang kami anggap sebagai tokoh agama di lingkungan kami. Pertemuan itu berjalan biasa saja. Kami saat itu tidak terlalu mengkhawatirkan isu penggusuran.

Perkiraan kami, kalaupun ada penggusuran, pemerintah provinsi pasti sudah menghentikan aliran listrik sehari sebelumnya. Listrik dan air pasti diputus terlebih dahulu. Kami juga mendengar beberapa orang yang membenarkan dugaan warga soal belum akan dilakukannya penggusuran.

Namun rasa cemas kami bersama warga yang akan terkena gusuran tetap ada.

Akhirnya Habib Soleh memberikan saran pada kami semua. Apabila besok pagi terjadi penggusuran, jangan ada yang arogan apalagi melakukan perlawanan karena kami tidak akan lagi berhadapan dengan satuan tugas polisi pamong praja. Tapi polisi. Itu pasti!

Belum lagi kami melanjutkan pembicaraan mengenai penggusuran kampung, tiba-tiba seorang warga datang. Dia terlihat begitu panik dan dia bilang di jalan raya sudah ada alat-alat berat, atau *beko* (ekskavator), yang dijaga beberapa anggota polisi.

Akhirnya kami bergegas untuk memastikan kebenarannya. Ternyata benar apa adanya. Kami pun kembali ke rumah Habib Soleh. Kami secara spontan menyepakati untuk melakukan ronda di setiap RT masing-masing untuk menjaga hal-hal yang tidak kami inginkan.

Kami langsung bubar pulang ke rumah masingmasing sebelum berangkat ronda hingga pukul lima pagi. *Alhamdulillah* tidak terjadi apa-apa.

Setelah itu, kami tidur di teras rumah kami masingmasing. Tak lama kemudian, istri saya membangunkan dan mengatakan di jalan raya telah terjadi keributan. Saya langsung bergegas menuju tempat kejadian.

Insiden itu terjadi pada pagi hari 20 Agustus 2015. Saat itu sedang terjadi adu mulut antara polisi dengan warga.

Saya juga melihat ada pak camat dan pak lurah. Saya merasa sedikit tenang melihat mereka dan kembali ke rumah.

Tapi sebelum sampai rumah, penggusuran itu terjadi begitu saja. Satu rumah telah dirubuhkan, ibu-ibu menjerit, anak-anak menangis ketakutan.

Saya langsung menghadap polisi yang mengawal penggusuran. Saya bersama teman-teman memohon agar penggusuran dihentikan terlebih dahulu, berkata hargailah kami sebagai manusia dan manusiakanlah kami sebagai manusia.

Karena saat itu aliran listrik belum diputus, akhirnya penggusuran dihentikan. Saya kembali ke rumah dan menyuruh istri ke luar menuju rumah susun, sambil menggendong cucu dan surat-surat penting. Saya sendiri masuk ke dalam rumah untuk mengeluarkan barang-barang dibantu sejumlah teman.

Tapi saya tidak bisa membawa barang-barang keluarga ke rumah susun karena jalan sudah ditutup. Barang-barang itu akhirnya saya taruh di sebuah tanah kosong yang tidak terkena gusur. Baru jam empat sore kami selesai mengeluarkan barangbarang itu. Itupun tidak semuanya. Hanya yang penting-penting saja.

Belum lama istirahat, polisi sudah penuh di depan rumah warga sambil menyuruh kami untuk segera mengosongkan rumah karena akan digusur sekarang juga. Seraya meneteskan air mata, saya keluar melalui puing-puing rumah yang sudah dirubuhkan karena semua jalan ditutup. Barang-barang saya masih tertinggal di tanah kosong yang tidak tergusur. Baru kali itu saya menangis sebagai orang dewasa.

Pukul lima sore saya sampai di rumah susun. Saya tidak menemukan istri dan cucu di sana. Baru beberapa menit kemudian istri saya muncul sambil menangis. Cucu kamipun demikian.

Saya bersama anak kemudian melapor ke pengelola rumah susun dan kami langsung di antar menuju unit yang akan kami tempati. Saat itu kami diberi pulsa listrik seharga 20.000 rupiah.

Lalu kami buka pintu rumah dan menemukannya dalam keadaan kosong, Hanya ada debu yang memenuhi semua ruangan. Karena tidak bisa ditempati, saya ungsikan istri dan cucu ke rumah anak. Sementara saya masih harus bekerja membersihkan debu di unit. Saya lelah dan akhirnya tidur beralaskan kardus yang saya temukan di rusun.

Baru keesokan harinya saya bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi kami kebingungan bagaimana memindahkan barang-barang kami yang masih tertinggal. Kami tidak punya gerobak untuk mengangkutnya. Jaraknya pun terlalu jauh untuk bolak-balik dan mengambilnya dengan tangan.

Akhirnya istri saya pergi ke pasar untuk menjual perhiasan seberat lima gram. Uangnya untuk ongkos angkut barang-barang dan bayar sewa gerobak. Sementara sisanya untuk biaya sehari-hari.

.....

Hidup selama di rusun jauh lebih sulit. Saya sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan, terutama di usia yang sudah mencapai 60an tahun. Sehari-harinya saya hanya mengandalkan bantuan anak-anak.



Anak tinggal dirumah susum

oleh Heriyaneppi (awal 50an tahun)

Saat ini tanggal 29 Mei 2016

Saya salah seorang warga rusunawa Jatinegara. Awalnya tinggal di Kampung Pulo, Kampung Melayu yang pada tanggal 20 Agustus 2015 tahun lalu tergusur untuk normalisasi sungai Ciliwung. Warga Kampung Pulo melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan demi memperoleh penggantian atas harta yang kami miliki seperti tanah dan bangunan pada pihak pemerintah. Kami sadar telah berkontribusi dengan membayar pajak bumi dan bangunan.



amun pemerintah tetap menggiring warga pindah ke rumah susun sewa.

Awalnya, sewa rusun gratis selama tiga bulan. Namun listrik dan air PAM harus bayar tiap bulan. Sewa rusun sebulan Rp 300.000, ditambah listrik, dan air PAM seharga Rp 5.500 per kubik.

Setelah ada membayar ini itu, baru terpikir oleh kami ternyata di rusun tidak seindah dan senyaman tinggal di Kampung Pulo. Di sana kami tidak memikirkan biaya hidup yang sangat tinggi. Sisi sosial yang kental di kampung pun yang saya rasa sudah hilang sejak tinggal di rusunawa. Sementara anak saya juga tidak *kerasan* tinggal di rusun.

Tentang biaya hidup yang tinggi

Saya seorang ibu yang tidak ada penghasilan. Selama ini saya dibantu oleh dua orang menantu yang bekerja. Selain itu saya juga kadang bekerja membantu-bantu tetangga.

Biasanya semua kebutuhan sudah terpenuhi dari bantuan anak-anak. Kini malah kurang.

Sisi sosial yang berkurang

Biasanya kami bertetangga selalu terbuka seperti makan bancakan/bersama-sama. Sekarang hanya tinggal kenangan saja hal seperti itu. Saat bepergian kita bisa saling titip anak pada tetangga kiri kanan. Tapi di rusun hidup sudah seperti tidak ada lagi tetangga walaupun sebenarnya ada. Hubungan bertetangga sudah terasa agak formil.

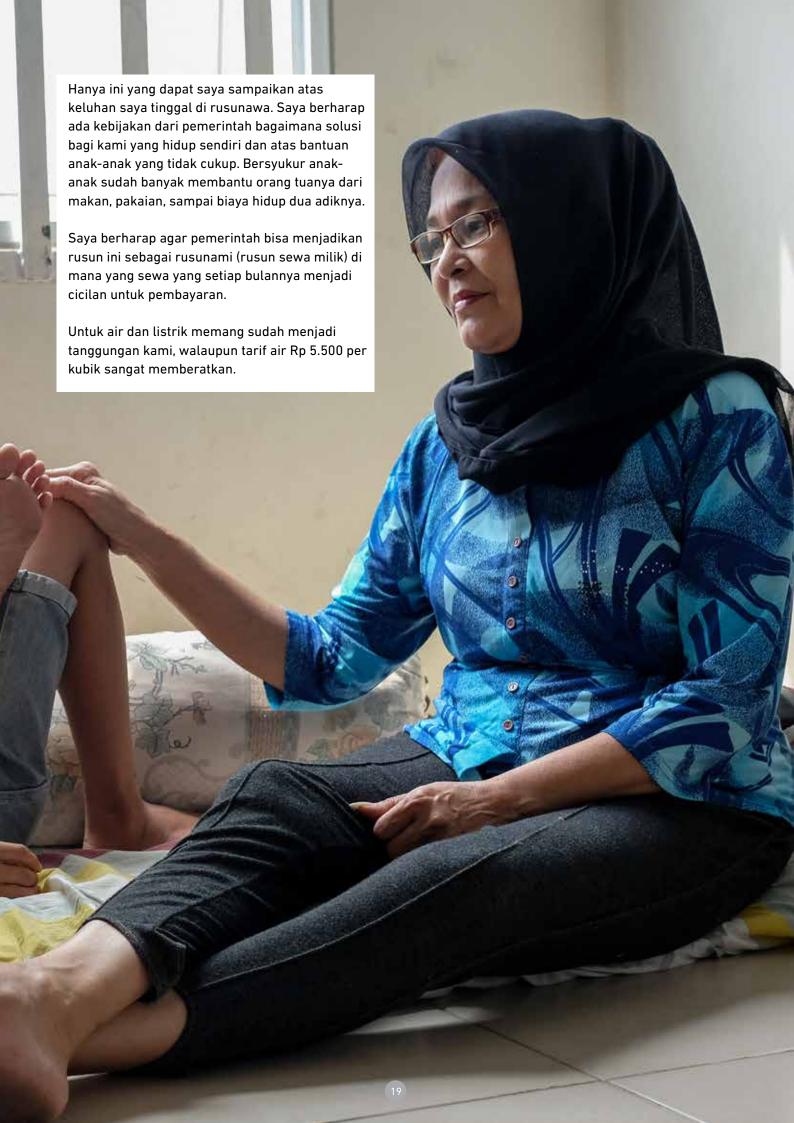
Anak tidak betah di rumah

Karena sarana yang kurang tepat untuk anak-anak bermain di rusunawa, banyak anak pergi jauh untuk main. Seperti anak laki-laki saya berumur 12 tahun kelas 6 SD. Sekarang bermain di Kampung Pulo, tempat tinggalnya dulu.

Setelah berbaur dengan anak-anak di sekitar rusun, sepertinya anak saya sudah tidak bisa lagi diatur sampai sering membolos sekolah sekitar satu minggu lamanya. Saya mendapat kabar atau informasi langsung oleh guru yang datang ke tempat saya tinggal/rusunawa.

Sampai mau ujian pun susah sekali pulang dan selalu saya yang jemput jam 10 malam. Paginya saya antar ke sekolah takut kalau-kalau dia bolos lagi.

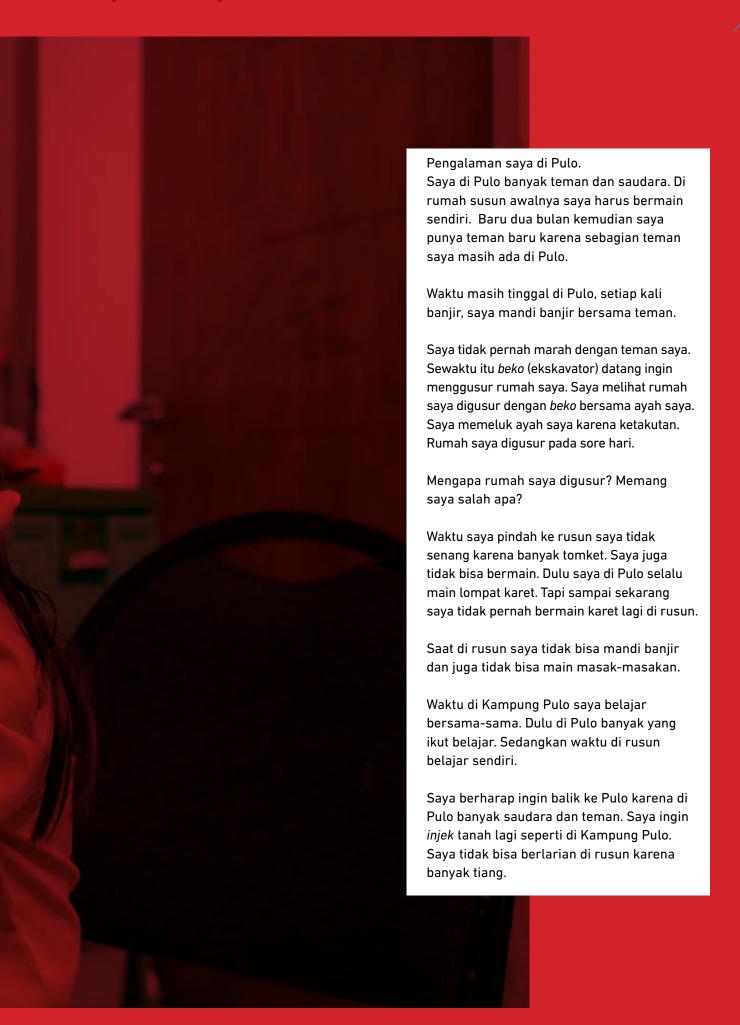














Halo, nama saya Fara Difa Ramadhani. Saya duduk di kelas V SDN Bukit Duri 10 PT. Saya bercita-cita menjadi pramugari. Hobi saya belajar. Saya tinggal di tower A lantai 16.



aya lahir di Kampung Pulo. Saya sering bermain bersama teman-teman di kali. Ada yang berenang dan juga ada yang main air. Hatiku menjadi senang. Tetapi kalau pada musim hujan kampungku menjadi banjir.

Pada saat banjir warga Kampung Pulo mengungsi di dataran tinggi. Setelah banjir kampung kami penuh sampah. Maka warga Kampung Pulo membersihkan desa secara gotong royong.

Kata ayah saya, di Kampung Pulo ada program pemerintah namanya normalisasi kali. Warga akan digusur. Awalnya warga tidak setuju dengan adanya normalisasi karena warga tidak mendapat ganti rugi sama sekali. Tapi mau tidak mau, mereka akan gusur. Pemerintah hanya menyiapkan rumah susun sewa (rusunawa). Akibatnya, ada perlawanan dari warga saat penggusuran terjadi.

Biasanya, saya di Kampung Pulo bermain masakmasakan, main boneka, main sepeda bersama temanteman yaitu Virly, Sofi, Aza, dan Intan.

Waktu masih main di Pulo, saya juga suka mandi di kali. Kaki saya pernah *kejeblos* di lumpur kali saat bermain. Untungnya, saya *ditolongin* sama temanteman. Setelah berhasil keluar dari lumpur, sandal saya hanyut. Untung *diambilin* sama tukang *eretan* (penyedia jasa penyeberangan sungai dari kawasan Kampung Pulo ke Bukit Duri--red.). Lalu saya bilang terima kasih. Beberapa hari kemudian, teman saya ada yang mau masuk kolong *getek* (perahu kecil untuk menyeberang kali--red.). Untungnya ditolongin sama uminya Sofi.

Ayah pernah melarang saya mandi di kali karena takut hanyut. Tapi kalau mamah membolehkan. Setiap saya dilarang mandi di kali, saya pasti selalu menangis. Karena saya ingin main bersama teman-teman di kali. Saya merasa gembira karena mandi di kali bersama teman-teman. Waktu itu ada yang lompat dari *getek*. Saya merasa senang *menyelam-nyelam* di kali, dan pura-pura menjadi tim penyelamat bersama temanteman. Ada yang pura-pura hanyut dan ada yang nolongin yang hanyut. Itulah pengalaman saya yang menyenangkan.

Kondisi rumah saya waktu di Pulo tidak bocor. Waktu di Pulo rumahnya luas dan ada dua lantai. Walaupun banyak tikus, tetapi barang-barang saya muat masuk di rumah. Air juga tidak bayar.

Tapi kondisi rumah di rusun saya bocor. Tempatnya kecil dan tidak ada lantai atas. Banyak tomketnya juga. Barang-barang saya tidak muat, sehingga akhirnya ayah menjual perabotan kami ke tukang barang bekas.

Air di rusun juga berbau kaporit walaupun bayar. Juga tidak bisa dimasak. Jadi kita harus beli air galon untuk minum. Air PAM harus dikecilkan supaya lebih hemat. Sedangkan, waktu di Pulo, airnya gratis dan bisa dimasak.

Warga sangat berberat hati menempati rusunawa karena harus membayar sewa untuk seumur hidup. Banyak warga tidak mampu membayarnya.

Setelah saya tinggal di rusunawa, banyak kejadian seperti terjebak di dalam *lift* atau *lift*-nya rusak. Warung menjadi jauh karena ditempatkan di lantai dasar atau lantai satu.

Bukan itu saja, sekolah kami menjadi jauh. Untung saja ada bus sekolah. Rasanya saya ingin pindah sekolah yang dekat rusun. Tapi tanggung, *dikit* lagi saya mau lulus sekolah dasar. Saya juga jarang bertemu teman lama. Selain itu, saya tidak suka rusun karena bocor.









oleh Ayu Fitria Zinatul (11 tahun)

engalaman menyenangkan di Kampung Pulo: Saya punya banyak teman. Dulu saya juga punyai satu kucing. Teman-teman saya sangat baik. Saya suka bermain di lapangan. Kalau di lapangan saya bermain bola dan masak-masakan. Saya sering memakai cabai, daun dan pasir untuk bermain. Kadangkadang saya mengayuh sepeda dan mandi di sungai. Saya sering bermain petasan. Inilah pengalaman menyenangkan saya.

Pengalaman menyedihkan waktu di Kampung Pulo.

Waktu itu saya sedih karena Kampung Pulo digusur. Ada keributan antara warga Kampung Pulo dan polisi. Sampai-sampai ada beko (ekskavator) yang dibakar. Akhirnya semuanya pindah ke rumah rumah susun. Saya mempunyai teman baru dan tetangga baru.

Saya menata baju di rumah saudara saya. Saya sedih rumah saya hancur dan kucing saya mati karena kena beko. Saya sangat sedih kucing saya mati. Saya menangis dan dihibur kakak saya.





aya sangat sedih waktu rumah saya di Kampung Pulo *mau* digusur *sama* pemerintah. Ya Allah kenapa engkau memberikan cobaan terlalu berat?

Waktu akan digusur, ada keributan Kampung Pulo. Warga bertengkar dengan aparat karena mereka tidak mau rumah digusur. Yang terkena gusuran pertama rumah-rumah di *Gang 5*.

Waktu saya masih angkut barang, tiba-tiba ada beko (ekskavator) di belakang rumah. Saya sangat kaget. Tapi saya menerima apa adanya. Karena warga marah sampai-sampai beko dibakar. Akibat pertengkaran itu, polisi menangkap warga Kampung Pulo.

Pengalaman menyenangkan

Saya sering mandi di kali. Juga main *guru-guruan*, *masak-masakan*, main *dokter-dokteran*, dan main di saung. Saya sangat gembira tinggal di Kampung Pulo.

Saya tidak senang tinggal di rumah susun yang sekarang. Rumah saya bocor, banyak tomket, dan juga airnya *bikin* saya gatal-gatal. Padahal saya mandi di kali *nggak gatel*. Tapi saya bersyukur masih diberi tempat tinggal.

Waktu saya di sekolah, saya disuruh pulang sama guru *gara-gara* rumah saya akan digusur. Setelah sampai, tiba-tiba rumah saya sudah ambruk, sudah *diinjek beko*. Saya sangat sedih. Saya harus pakai masker karena banyak debu.

Waktu itu saya menyebut "Allahu Akbar" terusmenerus. Warga juga melakukan hal yang sama saat terjadi penggusuran di Kampung Pulo. Mama Azza diwawancarai *sama* TV One.

Pas saya pindah ke rumah susun, saya merasa asing. Di sini barang-barang saya tidak muat. Rumah saya di Pulo besar, rumah saya di rumah susun kecil.





pedagang Rusunawa atinegara Barat I

oleh Ida (pertengahan 40an)

Pertama kali berdagang, saya bersama suami ditempatkan di Tower B, di sudut tangga darurat. Di situ kami mulai berdagang makanan, minuman ringan, hingga Soto Betawi.

Dari situ pula dagangan kami mulai ramai oleh pembeli hingga pendapatan kami mulai naik. Dari modal sekian ratus ribu hingga beberapa lipat pendapatannya dalam beberapa bulan.



Beberapa bulan kemudian, dagangan kami pindah dari Tower B ke Tower A--tempat kami tinggal. Di situ juga dagangan kami mengalami kemajuan hingga pendapatan kami mengalami kenaikan.

Tiba-tiba ada teman menyarankan untuk pindah keluar ke pinggir jalan di luar rumah susun Jatinegara Barat II. Tapi kami tidak menyetujui usulan teman itu, karena kami pikir di situ sudah bagus pendapatannya.

Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul peraturan yang menurut kami tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Karena peraturan itu, saya dan suami mengikuti saran teman untuk berdagang di depan pagar Rusunawa Jatinegara Barat II.

Mula-mula kami modal sebuah etalase kecil beserta sejumlah alat lain untuk keperluan dagang di luar pagar. Beberapa bulan kemudian kami mulai berdagang di luar. Di situ juga kami mengalami pendapatan yang lumayan.

Tiba-tiba, ada lagi peraturan yang menyatakan para pedagang tidak boleh berjualan di luar pagar. Pihak pengelola, melalui petugas keamanan, melarang semua orang berdagang di luar pagar Rusunawa Jatinegara Barat II.

Para pedagang tidak begitu saja menyetujui perpindahan usaha dagang itu.

Tetapi bagaimana lagi, kalau kita tidak mengikuti peraturan itu kami takut nanti ada sanksi dari pihak pengelola maupun pemerintah terkait. Akhirnya kami manaati aturan dan kembali masuk ke dalam.

Mula-mula, pengelola menempatkan kami di Taman Rusunawa Jatinegara Barat II, di pojok dekat pohon besar. Beberapa hari kami berdagang di situ, usaha saya dan suami mengalami pendapatan yang lebih besar dibandingkan di lantai 2, Tower A ataupun Tower B.

Tetapi usaha tidak begitu saja berjalan mulus sesuai impian. Kami harus bertahan dari berbagai kendala seperti hujan, becek, angin dan kegelapan.

Kemudian dengan modal sendiri demi kenyamanan pelanggan, kami membeli berbagai perlengkapan seperti tenda dan payung supaya para pembeli nyaman menikmati makanan dan minuman yang kami jajakan.

Para pedagang juga meminta pihak pengelola atau pemerintah untuk menyediakan alat pelindung usaha. Alhamdullilah, respon atas laporan kami diterima oleh pihak pengelola, yaitu dinas perdagangan dan perumahan rakyat.

Akhirnya, terbentuklah sebuah organisasi untuk para pedagang supaya kami dapat berdagang dengan nyaman dan tenang mencari nafkah untuk membayar sewa rumah, air, pulsa--yang sewaktu masih tinggal di Kampung Pulo tidak begitu banyak.

Di sini biaya hidup kami lebih besar dibanding di Kampung Pulo, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan dagang soto Betawi. Kami harus kepanasan waktu panas, kehujanan waktu hujan. Tapi bagaimana lagi, semua kami jalani untuk kelangsungan hidup sekeluarga.

Begitu berat hidup kami jalani dan begitu besar biaya yang harus kami keluarkan. Tapi kami juga merasa nyaman di sini karena jauh dari banjir. Anak bisa sekolah tanpa kendala air, juga suami dalam menjalani usaha.

Kami para pedagang Rusunawa Jatinegara Barat II meminta supaya pemerintah memperhatikan kebutuhan kami untuk bisa berdagang dan hidup nyaman, layak, tenteram dan aman damai tanpa adanya peraturan yang menyusahkan. Semua peraturan tertulis dan tidak tertulis selama ini banyak menjadi beban kami selama di sini. Mudah-mudahan curahan hati kami bisa tersalurkan dan mendapat respon positif dari pihak pemerintah terkait.

Bukan maksud kami untuk meratapi hidup yang susah. Tapi kami ingin hidup berubah lebih baik. Karena kami *capek* harus *mondar-mandir* memindahkan perlengkapan dagang dari atas ke bawah dan begitu sebaliknya. Kami lelah letih, hingga kehilangan waktu untuk istirahat berkumpul bersama keluarga, teman, dan tetangga.

Terima kasih kami ucapkan. Semoga tulisan ini menjadi aspirasi dari kami untuk disampaikan baik pengelola maupun pemerintah terkait.

Catatan redaksi:

Redaksi menemukan ada rentetan peristiwa yang melompat. Kami harus melakukan wawancara untuk bertanya lebih lanjut pada ibu Ida untuk menjelaskan kronologi dengan dibantu suami sekaligus rekan dagang, pak Iwan Setiawan. Namun karena ibu Ida sibuk, dengan seizin beliau, redaksi menambahkan sedikit kronologi agar duduk perkara berdagang di rumah susun sewa lebih jelas bagi pembaca.

Hasil wawancara dengan ibu Ida dan pak Iwan:

Awal mula berjualan di Tower B dekat tangga darurat lantai dua. Namun karena tidak strategis, mereka pindah sendiri ke Tower A. Di Tower A penjualan lumayan, bahkan ada satu hari di mana ada perayaan Topekong, dagangan ibu Ida habis.

Namun sesudah itu pendapatan menurun drastis. Rata-rata penghasilan kotor Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Lalu ada ajakan dagang ke bawah di luar pagar, di trotoar pinggir jalan Jatinegara Barat. Ketika berdagang di luar, penghasilan kotor bisa mencapai Rp300 ribu hingga bahkan Rp700 ribu.

Mereka sempat pindah lagi ke lantai dasar ketika hujan di luar, berdagang dekat *lift*. Namun di lokasi ini pun terkadang disuruh pindah, karena masing masing petugas keamanan menerapkan kebijakan berbeda. Lalu sempat diminta pindah ke bagian belakang rumah susun meski masih di lantai dasar.

Setelah itu pengelola meminta mereka pindah lagi ke lantai dua. Pak Iwan dan bu Ida sempat berhenti berdagang sementara karena kesal atas peraturan yang terus-menerus berganti. Namun hutang Rp 500 ribu untuk membeli etalase masih belum terbayar.

Mereka kemudian nekat berjualan lagi di luar pagar rumah susun meski harus *dipelototin* oleh petugas keamanan. Pak Iwan dan ibu Ida bisa berjualan di trotoar setelah jam 16.00 karena sebelum itu, ada tim Satpol PP bertugas jaga dan melarang mereka menjajakan lapak.







empat tinggal yang dulu, Kampung Pulo, sangat bersahabat dengan rasa persaudaraan yang kental dibandingkan tempat yang sekarang. Saat hidup di Kampung Pulo, saya tidak memikirkan apa-apa. Berbeda saat tinggal di rumah susun sewa seperti sekarang. Saya sering membayangkan bagaimana jika gedung ini terkena musibah, seperti gempa bumi atau *kebakaran*. Lalu bagaimana kalau gedung ini sudah tua.

Bayangkan, *lift* saja tidak layak digunakan karena sering bermasalah. Sering aktivitas warga yang akan bekerja dan anak-anak yang akan berangkat sekolah, terhambat oleh *lift* ini.

Menurut saya, kehidupan di rumah susun itu seperti argo taksi yang langsung berjalan begitu pintu mobil terbuka. Sementara kehidupan saya di Kampung Pulo seperti naik bajaj, bisa saling tawar sebelum naik kendaraan.

Beginilah kehidupan warga Kampung Pulo yang tertindas, *terdzolimi* oleh kebijakan pemerintah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dulu pemerintah *janji* sebelum Kampung Pulo dibongkar, akan dibuat rumah deret. Ternyata bukan rumah deret, melainkan rumah saya yang *dideret beko* (ekskavator).

Sungguh kejam pemerintah ini. Sudah dibongkar *kaga* diganti. Malah saya sekarang ini seperti hewan. Saya sekarang memikirkan bayaran tiap bulan di tempat tinggal yang baru. Dulu saya tidak sewa, sekarang jadi sewa. Mana letak keadilan pemerintah sekarang ini? Pemerintah sekarang seperti komunis. Menindas hak pribumi. Mana tanah airku? Tanah airku milik komunis, bukan milik rakyatnya yang ditindas begitu saja.*

Memang hidup saya di rumah susun mewah seperti istana. Dilihat dari luar, ada sarana anak-anak. Ada juga kotak saran di samping lift walaupun tidak bermanfaat bagi penghuni rumah susun. Sebelum ada kotak saran, pihak pengelola kaga nanganin secepatnya protes langsung dari warga. Dari pada kotak saran lebih baik kotak amal. Lebih manfaat untuk membantu warga yang tidak mampu bayar sewa. Niat saya nawaitu. Perkataan saya untuk warga yang tertindas atau terdzalimi sama kebijakan pemerintah sekarang.

Sekarang pendapatan saya jauh menurun dibandingkan waktu masih tinggal di Kampung Pulo. Di sana, bisa berdagang dengan *enak*. Tidak ada aturan. Sekarang tinggal di rumah susun banyak aturannya. Di sini saya harus *bayar* air per kubik lima ribu lima ratus. Sangat berat bagi saya dan saudara-saudara yang membayar. Dulu di Kampung Pulo, air gratis. Mandi tinggal mandi. Tinggal *nyemplung* saja di kali. Lebih baik banjir daripada tinggal di rumah susun. Orang yang mengaku nyaman tinggal di rumah susun sebenarnya juga tidak mau tinggal di sini. Tapi mereka terpaksa. Mau ke mana lagi mereka akan tinggal?

Sekali lagi saya ingin Gubernur Ahok segera datang ke rumah susun. Lihat keadaan warga yang *kamu* pindahkan dari Kampung Pulo. Saudara kami pada menjerit menangis meratap. Di rumah susun, kami hanya bisa melihat tembok. Buka pintu lihat tembok. Ke mana-mana lihat tembok. Tapi kalau di Pulo, buka pintu bisa melihat pemandangan kali.

Catatan redaksi:

* Pak Iwan beberapa kali mengasosiasikan komunis dengan pemerintah yang menindas. Dia juga menyebut kata pribumi untuk menegaskan posisi warga yang terdzalimi, sementara pemerintah lebih memilih menyejahterakan non-pribumi. Ini menarik untuk digarisbawahi.

Setidaknya ia menunjukkan dua hal. *Pertama*, ada komunistophobia, dalam bahasa Soekarno, yang mengakar jauh dalam alam bawah sadar beberapa warga Kampung Pulo. *Kedua*, sentimen primordial yang pada akhirnya akan mengarah pada rasisme.

Redaksi menemukan jika dua hal tersebut tidak hanya terjadi pada warga Kampung Pulo belaka. Dalam liputan terakhir pada waktu penggusuran kampung Bukit Duri beberapa waktu lalu, kami juga menemui hal serupa. Komunisme memang jarang disebut, tetapi sentimen pribumi-non pribumi, terutama *Cina* kerap terlontar bersamaan dengan ungkapan kekesalan warga.

Bagi kami, ini juga masuk dalam persoalan struktural (bagaimanapun komunistophobia dan sentimen pribumi dan non pribumi adalah dua hal yang secara massif disuntikkan kepada kita orang Indonesia selama 32 tahun masa Orde Baru. Sementara rekonsiliasi sebagai satu-satunya jalan meretas hal tersebut tidak pernah dilakukan secara serius). Sialnya, dua hal tersebut juga tidak jarang dipakai untuk meredam, atau bahkan memukul mundur setiap protes yang dilontarkan kepada penguasa. Dan Jakarta yang memiliki gubernur beretnis Tionghoa adalah contoh terbaik untuk memahami hal ini.





Beban besar, pemasukan berkurang oleh Koko Wahyu (40an tahun)

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Bismillah.

Air dan listrik adalah pengeluaran yang besar dan harus

Mungkin pemerintah punya rencana untuk menata kehidupan rakyatnya, dengan ruang lingkungan yang lebih layak. Mungkin dengan alasan ini pemerintah provinsi Jakarta membersihkan dan menggusur tempat-tempat kumuh yang dianggap merusak pemandangan ibukota.

Kekumuhan dan kurangnya kesadaran untuk hidup bersih sebenarnya adalah PR bersama. Mungkin suatu tempat menjadi kumuh karena kurang penyuluhan dan sarana yang memadai. Kurangnya penyuluhan dan sarana memadai membuat Kampung Pulo menjadi tempat banjir sampah. Sama dengan kampung-kampung lainnya, kondisi kumuh di Kampung Pulo terjadi karena kurangnya sentuhan dari tangan pemerintah yang tulus dan manata.

Sentuhan tulus dan penataan. Itu kuncinya. Bukan malah menggusurnya.

Saya adalah salah satu korban dari penggusuran yang terjadi pada bulan Agustus 2015 lalu. Betapa arogannya pemerintah pada pagi itu. Para petugas mengaggap rumah kami sebagai kandang ayam. Mereka tidak sadar bahwa orang-orang membangun rumah itu penuh dengan pengorbanan.

Kita semua orang Pulo *gak* menuntut banyak. Hanya minta belas kasihan kepada pemerintah provinsi dan menagih janji kepada orang nomor satu di Indonesia. Mungkin sudah biasa. Kalau sudah dapat hajatnya dia lupa. Tapi ya sudahlah. Itu basi.

Mereka memakai bahasa intelek relokasi untuk menjelaskan pemindahan paksa warga Kampung Pulo ke rumah susun sewa Jatinegara Barat. Semua media menyebut penggusuran itu bertujuan untuk menyediakan kehidupan yang lebih layak, tertata dan demi kelangsungan hidup ibukota. Kami disebut mendapatkan fasilitas rumah susun mewah dan gratis.

Jujur saja, semua teman saya mengucapkan selamat karena telah menempati rumah susun sewa setara apartemen seperti di Singapura. Saya, bersama orangorang yang senasib dari penggusuran ini, punya cerita sedih yang mereka dan media tidak tahu.

Apa cerita sedihnya? Perekonomian yang memberatkan. Kami tadinya tidak perlu memikirkan biaya sewa, air dan listrik. Semuanya kalau dirupiahkan pasti lebih mahal dari kehidupan sebelumnya. Kami tadinya mempunyai tempat tinggal, yang meskipun sederhana, tapi milik sendiri. Sekarang kami menempati bangunan mewah dan menjulang tapi nyewa.

Kesejahteraan yang memburuk dan menyulitkan

Pemerintah pusat dan provinsi hanya berpikir soal ibukota yang tertata dan rapi. Mereka tidak pernah memikirkan masalah perekonomian rakyat menengah ke bawah. Hanya yang terlihat di media saja pemerintah memperbaiki kesejahteraan rakyat. Tapi kami para korban penggusuran punya pengalaman berbeda.

Di kehidupan sebelumnya, saya dan warga yang lainnya sangat mudah mencari nafkah tanpa banyak aturan yang menyulitkan. Hanya dengan buka pintu dan pasang meja, uang sudah bisa diputar. Lain halnya di kehidupan yang sekarang. Di rumah susun ini, kami sangat sulit sekali mencari nafkah untuk berdagang karena terlalu banyak peraturan-peraturan yang memberatkan: contohnya larangan dan surat peringatan bagi yang berdagang di depan unit. Para pedagang diberi tempat khusus di lantai yang sangat jauh jangkauan pembeli. Di situ, pedagang hanya bertahan seminggu.

Seharusnya mereka orang-orang pemerintahan provinsi meninjau langsung dan membuka mata. Mereka harus memberi warga rumah susun lahan dagang yang layak, *gampang* jangkauannya dari pembeli, agar para warga berprofesi pedagang lebih sejahtera. Jadi pemerintah tidak hanya memindahkan warganya tanpa memikirkan kelangsungan hidup selanjutnya, mengingat mayoritas penduduk Pulo adalah pedagang.

Fasilitas umum

Fasilitas umum di rumah susun terkadang membuat saya resah. Di dalam gedung yang terlihat mewah ini fasilitas umum penunjang aktifitas warga seperti *lift* sangat tidak bisa diandalkan. Sudah beberapa kali terjadi kerusakan. Sering warga terjebak di dalamnya sehingga menimbulkan ketakutan.

44



Sungguh mengiris hati. Anak saya yang berusia 4 tahun sampai sekarang trauma dengan *lift* karena dia mengalami dan melihat langsung kejadian pada saat warga ada yang terjebak di dalam *lift*.

Fasilitas bermain yang minim

Anak-anak sangat perlu tempat bermain di alam terbuka untuk perkembangan jiwa. Di Kampung Pulo, mereka bisa bebas berlari dan bermain tanpa ada pembatas tembok di kanan maupun kiri. Sementara di rumah susun, memang ada fasilitas tempat bermain yang disediakan oleh pengelola. Tetapi fasilitas itu tidak terjaga dan terawat dengan kondisi rusak dan membahayakan.

Anak-anakku adalah salah satu dari sekian anak Indonesia yang perkembangannya terenggut oleh orang-orang nomor satu di pemerintahan. Anak-anak sudah rindu dengan permainan karet yang biasa mereka mainkan di lapangan terbuka.

Kami orang-orang yang senasib, orang-orang yang tergusur, orang-orang yang kecewa. Dengan kehidupan seperti, warga akan mudah terprovokasi dalam hal apapun. Kami ingin mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang punya nilai sosial tinggi, peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan, dan peduli dengan masa depan.

Kami membentuk sebuah forum silaturahmi antar warga untuk mengumpulkan mereka yang mau dan mampu untuk berbuat. Kami ingin melakukan bakti sosial dan menyatukan dua menara gedung, tower A dan tower B, dalam satu visi dan misi:

- Untuk mewujudkan warga rumah susun yang aman dan sejahtera.
- Peduli terhadap sesama.
- Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sumber daya manusia.
- · Meningkatkan kesejahteraan.

Dari semua yang kita buat dan rancang demi kepentingan sesama warga, banyak sekali hambatan serta rintangan dari orang-orang yang berkepentingan. Forum ini berjalan sangat berat. Saling fitnah, omongan-omogan miring. Saling gesekmenggesek antar anggota. Tapi kami yakin semua ini adalah awal dari langkah kebaikan dan langkah kesuksesan untuk menyatukan warga rumah susun sewa Jatinegara Barat.

Harus lama serusun?

oleh Ade (30an tahun)

Program pak Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) perihal penggusuran sudah dimulai. Kampung Pulo merupakan salah satu target penggusuran pak Ahok. Sebelum pak Ahok menjadi gubernur, beliau merupakan wakil dari pak Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang menjadi presiden.



ada saat melakukan kampanye pemilihan umum gubernur Jakarta, pak Jokowi terkenal dengan kegiatan blusukan. Beliau sempat melakukan blusukan ke kampung kami, Kampung Pulo yang terkenal selalu terkena banjir setiap tahun. Pak Jokowi mendatangi warga Kampung Pulo untuk berkampanye sebagai kandidat gubernur Jakarta.

Salah satu yang pak Jokowi katakan kepada kami, warga Kampung Pulo, adalah: "jika nantinya kampung ini tergusur, saya akan bayar ganti ruginya. Bahkan kandang ayam pun akan saya ganti dan akan saya buatkan juga rumah deret." Mendengar ucapan pak Jokowi tersebut kami merasa lega dan senang.

Akhirnya pak Jokowi dan pak Ahok pun terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Belum lama menjabat sebagai gubernur dan belum memenuhi semua janjinya untuk Kampung Pulo, pak Jokowi malah ikut mencalonkan diri sebagai presiden. Pak Jokowi pun terpilih bersama pak Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Dengan terpilihnya pak Jokowi sebagai presiden, maka secara otomatis pak Ahok naik jabatan menjadi gubernur.

Kehidupan kami pun berubah. Pak Ahok melakukan penggusuran terhadap kampung kami tanpa ganti rugi sepeser pun. Kebijakan ini sangatlah bertolak belakang dengan apa yang diucapkan pak Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ucapan hanya menjadi ucapan tanpa realisasi. Pak Ahok menggusur Kampung Pulo pada tanggal 21 Agustus 2015 dan memindahkan kami yang tergusur ke rumah susun sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.

Di sini, di *rusunawa tercinta ini* kami tinggal dengan membayar sewa. Uang sewa perbulan adalah Rp300 ribu, tidak termasuk biaya listrik dan air (listrik memakai sistem prabayar sementara air Rp 5500 per kubik). Dulu, meski rumah kami di Kampung Pulo terbilang cukup sederhana dan sering banjir, tapi kami nyaman dan tenang tinggal di sana karena kami tidak perlu memikirkan pembayaran uang sewa dan air.

Namun saat tinggal di *rusunawa tercinta ini*, kami harus memikirkan uang sewa, listrik, juga air untuk memasak dan minum (satu galon seharga Rp18.000, untuk pemakaian satu minggu). Karena air di rusunawa diperoleh dari proses penyulingan, jika dimasak rasanya kurang enak. Jika air dipakai untuk mandi kulit menjadi gatal-gatal. Mungkin karena kulit

saya sangatlah sensitif. Padahal di Kampung Pulo saya tidak pernah memiliki masalah dengan kulit.

Meski banjir, air tanah di Kampung Pulo sangatlah bersih dan enak untuk dimasak atau diminum. Saya juga tidak pernah mengalami masalah dengan kulit jika airnya dipakai untuk mandi. Apakah air di rusunawa sudah benar-benar layak jika dipakai sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak?

Dulu, di Kampung Pulo saya tinggal bersebelahan dengan orang tua. Namun semenjak saya dipindahkan ke rusunawa tercinta ini saya tinggal terpisah jauh dengan orang tua. Saya di lantai atas, sementara orang tua di lantai bawah. Saya sangat khawatir dengan orang tua saya, karena jika sakit atau asmanya sedang kambuh, saya khawatir tidak ada yang mengetahuinya.

Bisa saja saya tinggal bareng bersama orang tua. Tapi tidak mungkin karena saya sudah menikah. Apalagi rusunawa tercinta ini tidaklah cukup luas untuk ditinggali bersama-sama. Saya sudah pernah meminta untuk pindah agar setidaknya bisa satu lantai dengan orang tua saya. Namun pihak pengelola bilang, "tidak bisa". Padahal, di lantai tempat orang tua saya tinggal, ada tempat yang masih kosong hingga sekarang.

Pemilihan unit di rusun ini dilakukan dengan proses kocok nomor. Pada saat itu saya adalah orang terakhir pada tahap I. Ketika saya mendapatkan nomor yang berbeda jauh dengan orang tua, saya langsung meminta ke pengelola untuk ditempatkan satu lantai dengan orang tua. Namun permintaan itu ditolak.

Dia tidak merasakan gimana khawatirnya saya. Saya sudah berusaha untuk melakukan pengajuan pindah lantai agar bisa berada dekat orang tua. Tapi mereka menjawab sudah tidak bisa lagi pindah karena terlanjur menandatangani surat perjanjian. Padahal, sebelum penandatanganan surat itu pun saya sudah pernah minta pindah lantai.

Lift di tempat saya sering bermasalah. Lalu gimana jika nanti orang tua saya sakit pada malam hari dan saya harus menunggu lift lama? Mereka tidak pernah memikirkan itu. Apa meraka tidak memiliki rasa kekhawatiran terhadap orang tua mereka sendiri ? Tega!.

Tidak hanya itu masalahnya, rumah susun yang saya tempati ketika bocor ketika hujan turun. Kebocoran tersebut sudah saya informasikan ke pihak ke pengelola. Mereka *bilang* sudah diperbaiki. Namun nyatanya hingga saat ini tempat saya masih bocor saat hujan turun.

Saat salah satu keluarga saya datang ke *rusunawa* tercinta ini untuk silaturahmi dengan membawa mobil, petugas keamanan melarang keluarga saya memarkir mobil di area rumah susun. Mereka *bilang* ini sudah larangan dari pemerintah. Di rumah susun, semua mobil dilarang parkir kecuali motor, kata para petugas itu.

Tapi, bagaimana dengan mobil para pengelola yang bekerja di rumah susun atau orang pemerintahan memarkir mobilnya di area rusunawa? Mereka yang datang *kan* keluarga saya sendiri dan bukan orang lain. Ini tidak adil!

Saya merupakan seorang karyawan swasta dengan penghasilan, yang alhamdulilah, cukup. Saya bersyukur karena masih dapat bekerja dan memiliki uang. Dulu gaji saya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan masih memiliki sisa untuk menabung. Namun, semenjak saya dan keluarga tinggal di rusunawa tercinta ini, gaji yang saya peroleh tidak lagi tersisa karena sudah habis untuk kehidupan saya sehari-hari, keluarga, orang tua, bayar sewa, listrik, dan juga air.

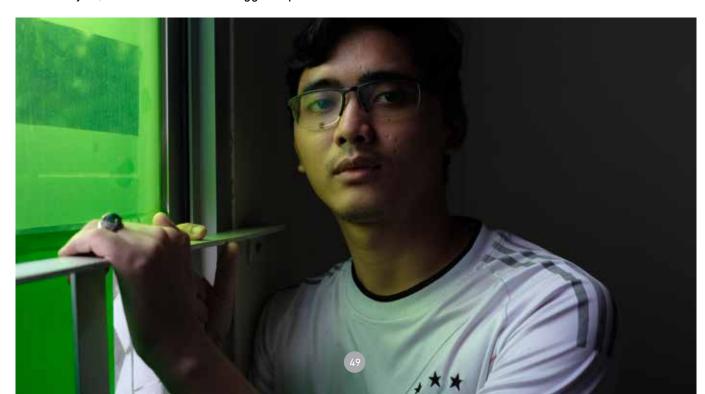
Dalam surat perjanjian, tercantum sebuah pasal yang menyatakan: jika tidak membayar sewa, kami akan menerima surat peringatan pertama, kedua, kemudian ketiga. Jika sudah mendapatkan surat peringatan ketiga dan kami belum juga mampu membayar sewa, maka kami akan dikeluarkan dari rusun. Jika itu semua terjadi, di mana kami harus tinggal? Apakah

kami harus tinggal di jalan? Di kolong jembatan? Atau di panti sosial?

Saat tinggal di Kampung Pulo, kami tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Tapi di rumah susun ini kami harus bekerja ekstra untuk kehidupan sehari-hari dan uang sewa. Bagaimana dengan mereka yang hanya memiliki ijazah sekolah dasar sehingga tidak bisa bekerja? Atau bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki modal yang cukup untuk berwiraswasta? Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki penghasilan pas-pasan, hanya mampu menghidupi keluarganya namun tidak cukup untuk membayar sewa dan air? Apakah pemerintah memikirkan hal tersebut? Sampai kapan kami harus membayar sewa?

Kenapa *rusunawa tercinta ini* tidak dijadikan rumah susun milik saja? Bukankan kebijakan ini bisa membuat kami tidak lagi terbebani berbagai biaya. Di dalam surat perjanjian, tercantum sebuah keterangan umur gedung rumah susun yang hanya 20 tahun. Selain itu, setiap dua tahun kami juga harus menandatangani perpanjangan surat perjanjian. Jika umur gedung sudah mencapai batas 20 tahun, di mana lagi kami akan dipindahkan? Di mana lagi kami harus tinggal? Hidup kami bagai bola saja yang ditendang dan *dioper* kemana-mana.

Saya pribadi memohon agar pemerintah memikirkan kehidupan warganya dan mempertimbangkan segala yang kami khawatirkan. Jangan sampai pemerintah mengorbankan kami dengan alasan perbaikan tata kota Jakarta. Perlakukan kami manusiawi. Junjunglah nilai keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Saya ucapkan terima kasih jika kalian melaksanakan hal tersebut. Salam.





Perlawanan akhir menjelang penghancuran di Bukit Duri, September 2016. Foto: Ucu Agustin.



